

## **PERLUASAN PENGATURAN DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Nur Wahyuni Utami<sup>1</sup> dan Mailinda Eka Yuniza<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menelaah dan memahami urgensi perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan implikasi apa saja yang timbul dari perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan yurisprudensi serta bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, juga penelitian ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebabkan oleh keterbatasan pejabat pemerintahan dalam melakukan diskresi, yang membuat pelaksanaan diskresi menjadi tidak efektif, khususnya diskresi terkait percepatan investasi. Implikasi yang timbul dari perluasan pengaturan diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu adanya potensi kekuasaan tidak terbatas dan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada pelanggaran terhadap hak warga masyarakat.

**Kata Kunci:** Diskresi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-undang Cipta Kerja

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **EXPANSION OF DISCRETION REGULATIONS IN LAW NUMBER 11 YEAR OF 2020 ON JOB CREATION**

By :

Nur Wahyuni Utami<sup>3</sup> and Mailinda Eka Yuniza<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

This research aims to knowing, analyzing and understanding the urgency of expanding discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation and what implications arise from the expansion of discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

This research is a legal research which applied a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. This study uses secondary data obtained from legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of related laws and regulations and jurisprudence. Primary legal materials consist of books, journals, papers, as well as other scientific research such as theses, dissertations, etc. The data obtained are then analyzed by the deductive-inductive method.

The result of research shows that the urgency of expanding discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation is caused by the limitations of government officials in exercising discretion, which makes the exercise of discretion ineffective, especially discretion related to investment acceleration. The implications arising from the expansion of discretionary arrangements in Law Number 11 of 2020 on Job Creation, are the potential for unlimited power and opportunities for abuse of power which leads to violations of the rights of citizens.

**Keywords:** Discretion, Law Number 11 of 2020, Job Creation Act

---

<sup>3</sup> Master's Student of the State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer at Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.